

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriana. 2009. *Analisis Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus Dinas Kesehatan Kota Sawahlunto)*. Tesis. Padang: Universitas Andalas.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Kementerian Keuangan. 2015. *Realisasi APBN Tahun Anggaran 2015 Tanggal 1 Januari s.d 30 September 2015. I-Account APBN-P*. Jakarta.
- Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 2011. *Pengembangan Kualitas SDM Pengelola Keuangan Negara Melalui Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP): Bagian Intergal dalam Implementasi Reformasi Manajemen Keuangan Negara*.
- Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Penyusunan APBN. 2014. *Pokok-pokok Siklus APBN di Indonesia Penyusunan Konsep Kebijakan dan Kapasitas Fiskal Sebagai Langkah Awal*. Jakarta.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Volume 2, Nomor 1, Hal.: 53-64.
- Halim, A, A Tjahyono dan M.F Husein. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Herriyanto, Hendris. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta*. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Leruth, Luc dan Elisabeth Paul. 2007. *A Principal-Agent Theory Approach to Public Expenditure Management System in Developing Countries*. OECD Journal on Budgeting, Vol. 7/3. Hlm.1-29.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Pelaksanaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Megantara, dkk. 2006. *Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan, Aplikasi di Indonesia*. Lembaga Pengkajian keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Badan Keuangan Departemen Keuangan RI.

Miliasih, Retno. 2012. *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru*. Tesis. Universitas Indonesia.

Nini. 2012. *Analisis Pelaksanaan Anggaran Pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi XXX*. Tesis. Padang:Universitas Andalas.

Nugroho, Mashudi Adi.2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penumpukan Pencairan Dana APBN di Akhir Tahun (Studi Kasus di KPPN Malang)*. Jurnal Ilmiah. Malang: Universitas Brawijaya.

Rachmat. 2010. *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Republik Indonesia. 2015. *Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama Tahun Anggaran 2015*. Jakarta.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar*.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas*.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah*.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN*.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN*.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.02/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015.*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.*

Sekaran, Uma. 2011. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis Edisi 4-Buku 2.* Jakarta: Salemba Empat.

Seftianova, Ratih dan Helmy Adam. 2013. *Pengaruh Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran pada Satker Wilayah KPPN Malang.* JRAK Vol. 4 No.1 Februari 2013 Hal. 75 - 84

Solikhin. 2014. *Evaluasi Penumpukan Pencairan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Akhir Tahun Anggaran Pada Satuan Kerja.* Tesis: UGM.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen.* Bandung: Alfabeta, CV.

Widhianto, Wahyu. 2010. *Good Governance dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.* Tesis: UI.

Yustika, Ahmad Erani. 2012. *Perekonomian Indonesia: Catatan Dari Luar Pagar.* Malang: Bayumedia Publishing.